

# **POLITIK PERKOTAAN DI SURABAYA PADA KEPEMIMPINAN TRI RISMAHARINI TAHUN 2010-2015: STUDI KASUS REVITALISASI KAMPUNG DOLLY**

**Lusi Andriyani, SIP.,M.Si**

**Mahasiswa Program Doktor UI dan Dosen Ilmu Politik FISIP UMJ**

[lusilamong@gmail.com](mailto:lusilamong@gmail.com)

## **Abstrak**

Kota dan wilayah perkotaan merupakan bagian wilayah yang telah menjadi kajian sejak tahun 1976 seiring dengan perdebatan teori *urban regime* di Eropa yang digunakan untuk melihat kota sebagai wilayah yang melaksanakan fungsi pelayanan sosial dan kesejahteraan rakyat. Pendekatan *urban regime* juga digunakan oleh Fainstein untuk menjelaskan lingkaran kekuasaan yang ada di administrasi. Pada tahun 1983 kajian perkotaan mengalami perkembangan dengan di publikasikannya pandangan tentang “*The City as Growth Machine*” dari Lexion.

Pada pendekatan *urban politic*, seperti yang dikemukakan oleh Bryan T. Downs dalam bukunya “*Politics, Change and Urban Crisis*” menempatkan tiga hal penting untuk menjadi poin kajian: *Pertama*, berkaitan dengan kewenangan politik yang dimiliki oleh kota serta fragmentasi yang terbangun dan bagaimana kota menyelesaikan permasalahannya. *Kedua*, peran elit lokal perkotaan dan kepercayaan massa terhadap elit lokal dalam menyelesaikan masalah perkotaan. *Ketiga*, kontrol dan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Kajian ini belum banyak berkembang dalam studi politik.

Saat ini kajian perkotaan lebih banyak melihat ruang sebagai objek kajian. Ruang publik perkotaan yang telah berubah fungsi akibat dari aktivitas masyarakat yang cenderung pluralis menimbulkan banyak masalah, di antaranya kejahatan, transportasi, perumahan, infrastruktur, dan masih banyak lagi. Hal tersebut dapat terjadi apabila kebijakan pemerintah kota tidak mampu mengimbangi tuntutan kebutuhan masyarakat perkotaan yang semakin kompleks.

Surabaya merupakan kota terbesar ke dua setelah Jakarta yang diindikasikan pada tahun 2015 akan menjadi kota berpenduduk terbanyak nomor lima di dunia. Sebagai kawasan mega-urban, berbagai masalah sosial yang munculkan masalah di perkotaan apabila pemerintah kota Surabaya tidak dapat memenuhi kebutuhan pelayanan publik bagi mereka seperti pada program revitalisasi kampung Dolly.

Kata Kunci: Politik Kota, elit lokal, partisipasi masyarakat.

## **1. Pendahuluan**

Kota dan wilayah perkotaan merupakan bagian wilayah yang telah menjadi kajian sejak tahun 1976 seiring dengan perdebatan teori *urban regime* di

Eropa yang digunakan untuk melihat kota sebagai wilayah yang melaksanakan fungsi pelayanan sosial dan kesejahteraan rakyat. Pendekatan *urban regime* juga digunakan oleh Fainstein untuk menjelaskan lingkaran kekuasaan yang ada di administrasi dan pada tahun 1980 pendekatan tersebut lebih cenderung pada “*urban political economy*”.<sup>27</sup> Pada tahun 1983 kajian perkotaan mengalami perkembangan dengan di publikasikannya “*The City as Growth Machine*” dari Lexion.

Pada pendekatan *urban politic*, seperti yang dikemukakan oleh Bryan T. Downs dalam bukunya “*Politics, Change and Urban Crisis*” menempatkan tiga hal penting untuk menjadi poin kajian<sup>28</sup>: *Pertama*, berkaitan dengan kewenangan politik yang dimiliki oleh kota serta fragmentasi yang terbangun dan bagaimana kota menyelesaikan permasalahannya. *Kedua*, peran elit lokal perkotaan dan kepercayaan massa terhadap elit lokal dalam menyelesaikan masalah perkotaan. *Ketiga*, kontrol dan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Kajian ini belum banyak berkembang dalam studi politik.

Saat ini kajian perkotaan lebih banyak melihat ruang sebagai objek kajian. Ruang publik perkotaan yang telah berubah fungsi akibat dari aktivitas masyarakat yang cenderung pluralis menimbulkan banyak masalah, di antaranya kejahatan, transportasi, perumahan, infrastruktur, dan masih banyak lagi. Hal tersebut dapat terjadi apabila kebijakan pemerintah kota tidak mampu mengimbangi tuntutan kebutuhan masyarakat perkotaan yang semakin kompleks.

---

<sup>27</sup> Alan Harding, *North American Urban Political Economy*, Urban Theory and British Research, *British Journal of Political Science*, Vol. 29, No. 4 (Oct., 1999), pp. 673-698 Published by: Cambridge University Press, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/194243>, Accessed: 05-04-2016 06:54 UTC.

<sup>28</sup> Bryan T. Downes, *Politics, Change, and The Urban Crisis*, 1976, Wadworth Publishing company, California, hal. 5-6.

Pertumbuhan penduduk di kota-kota besar dunia mengalami banyak peningkatan yang mendorong terjadinya urbanisasi dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Seperti yang dilaporkan oleh PBB pada tahun 1984 yang berjudul “*Prospect of World Urbanization*” yang menyebutkan bahwa pada tahun 2000 akan terdapat 23 kota metropolis dengan penduduk diatas 10 juta orang dimana Jakarta termasuk sebagai kota terpadat ke-11.<sup>29</sup> Menurut data dari United Nations tahun 2014, saat ini sekitar 54% dari total jumlah penduduk bumi bertempat tinggal di perkotaan. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai sekitar 66% pada tahun 2050. Dari jumlah tersebut, negara- negara Asia akan menjadi tempat tinggal bagi sekitar 53% populasi penduduk perkotaan di dunia. Negara-negara Asia masih relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara di lainnya, seperti Afrika, dan beberapa kota besar di negara-negara Asia seperti Tokyo, New Delhi, Shanghai, dan Mumbai akan muncul sebagai kota raksasa (*megacities*). Adapun kota-kota lainnya, seperti Manila dan Jakarta, juga tengah dalam proses untuk tumbuh menjadi kota raksasa.<sup>30</sup>

Kota mempunyai peran penting bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan manusia, antara lain dalam hal perumahan, lapangan kerja, interaksi sosial dan tempat rekreasi. Manusia sendiri mempunyai kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup, baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikologis). Untuk menciptakan keseimbangan hidup yang berkualitas bagi kehidupan masyarakat perkotaan dan sekitarnya perlu menjaga fungsi-fungsi lingkungan dan fungsi sosial secara berkualitas. Untuk dapat menjaga

---

<sup>29</sup> Herlianto, *Urbanisasi, Pembangunan dan Kerusakan Kota Bandung*, PT Alumni, 1997, hal. 3

<sup>30</sup> Penanganan Masalah Permukiman Perkotaan melalui Penerapan Konsep Kota Kompak (*Compact City*) dan *Transit-Oriented Development (TOD)* Tim Peneliti Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada Kontak: s1pwk\_ugm@yahoo.co.id, pramono\_wid@yahoo.co.id

keseimbangan tersebut dibutuhkan perencanaan yang komprehensif terhadap tata ruang perkotaan.

Masalah perkotaan menjadi topik penting menjelang tahun 2000 untuk menyikapi perkembangan perkotaan saat ini, terutama berkaitan dengan manajemen perkotaan. Dalam kongres metropolis sedunia yang diselenggarakan di Melbourne Australia dibahas enam masalah pokok yang dihadapi kota-kota besar di dunia. Masalah-masalah tersebut mencakup point-point:<sup>31</sup>

1. Pertumbuhan penduduk perkotaan yang tidak terkendali.
2. Perumahan rakyat dan sarana fisik dan sosial yang semakin tidak memadai.
3. Lingkungan hidup dan kesehatan yang semakin merosot.
4. Ekonomi kita dan kesempatan kerja yang makin tidak seimbang.
5. Lalulintas dan transportasi yang semakin langka.
6. Organisasi dan manajemen perkotaan yang makin tidak mampu.

Kota-kota yang ada di kawasan Asia-Pasifik menunjukkan gejala yang sama. Pertumbuhan kota di kawasan Asia-Pasifik lebih cepat sejalan dengan arus globalisasi. Dibangunnya Empire state building dan World Trade Center di New York, Sears Tower di Chicago, menara kembar Petronas di Kuala Lumpur menunjukkan pertumbuhan kota yang cepat. Seperti yang telah dilaporkan oleh UNDP pada tahun 1995 yang meramalkan situasi pertumbuhan penduduk megapolitan seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel. 1

Laporan UNDP Pertumbuhan Penduduk Megapolitan di Asia-Pasifik

<b>Kota</b>	<b>Negara</b>	<b>1995</b>	<b>2010</b>	<b>2025</b>	<b>1995-2025</b>
		<b>(Juta)</b>	<b>(Juta)</b>	<b>(Juta)</b>	<b>(%)</b>
Bangkok	Thailand	9,7	14,0	22,5	2,83

<sup>31</sup> Herlianto, Urbanisasi, Pembangunan dan Kerusakan Kota Bandung., PT Alumni, 1997, hal. 5

Beijing	Cina	12,4	17,8	22,3	1,97
Jakarta	Indonesia	11,5	19,2	24,9	2,60
Manila	Filipina	9,3	13,7	16,5	1,92
Osaka	Jepang	10,6	10,6	10,6	0,00
Seaul	Korea Selatan	11,6	13,0	13,3	0,45
Sanghai	Cina	15,1	21,5	26,8	1,93
Tokyo	Jepang	26,8	28,7	28,7	0,23
Yangoon	Myanmar	3,9	10,0	10,0	3,19

Sumber: laporan UNDP tahun 1995 dalam buku Urbanisasi, Pembangunan dan Pertumbuhan Kota, hal.8

Angka-angka diatas menunjukkan bahwa persentase penduduk perkotaan yang ada di negara- negara sedang berkembang mengalami kenaikan rata-rata 2% bahkan lebih. Perkembangan perkotaan menunjukkan simbol kemajuan ekonomi yang menawarkan ruang harapan dan kesempatan untuk maju.

Perkembangan perkotaan saat ini telah memunculkan masalah tersendiri, diantaranya transportasi, kebutuhan infrastruktur, pemenuhan lapangan pekerjaan, kebutuhan akan perumahan, serta kebutuhan terhadap ruang publik lainnya. Selain masalah infrastruktur, perkotaan juga menyimpan masalah sosial yang bersumber dari kemiskinan diperkotaan. Dampak dari kemiskinan di perkotaan telah memunculkan pelacuran yang telah berkembang menjadi bisnis, seperti di Tokyo yang dikenal dengan “*Baisun Takusi*”.<sup>32</sup> Di Jakarta, hal serupa juga dilakukan dengan pola yang tertutup saat ada event besar dengan dalih untuk menemani dan mendampingi tamu. Perkembangan bisnis pelacuran juga telah mendorong

---

<sup>32</sup>Baisun Takusi merupakan model pelacuran dimana mereka melakukan transaksi dalam satu paket dengan menyewa taxi atau kendaraan sewa lainnya yang tertutup dengan tarif argo 35.000 yen dan tarif pelayanan 30.000 Yen. Sutrisno, Bedanya Taksi pelacur Jepang dan Indonesia, sutrisnobudihardjo.blogspot.co.id, 5 Maret 2014, diakses pada tanggal 24 Oktober 2016.

parlemen Prancis untuk meloloskan sebuah undang-undang yang menghukum pengguna layanan pekerja seks komersial (PSK) dengan denda mencapai 3.750 euro atau setara dengan Rp56,4 juta.<sup>33</sup>

Selain keimiskinan, faktor lingkungan dan kesehatan juga mempunyai peran penting. Kualitas lingkungan hidup perkotaan, menjadi salah satu tolok ukur kenyamanan kota. Berdasarkan data WHO, dari hasil penelitian yang mengambil sampel udara dari 795 kota di 67 negara pada 2008 dan 2013, terdapat 80% kota di seluruh dunia gagal memenuhi pedoman batas aman kualitas udara. Hanya 2% dari kota-kota di negara-negara miskin dan 44% kota di negara kaya yang memiliki kualitas udara memenuhi standar aman internasional.<sup>34</sup>

Faktor lain yang sangat penting untuk membangun kenyamanan kehidupan masyarakat di perkotaan adalah masalah keamanan dan ketertiban kota dan perumahan. Banyaknya premanisme, perampokan, pencurian, tawuran, bentrok antar warga dan sejenisnya merupakan implikasi dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi perkotaan yang ada.

Saat ini Indonesia mendapatkan peluang yang sangat penting dalam menyusun agenda dunia tentang perkotaan.<sup>35</sup> Peran strategis tersebut ditunjukkan dengan posisi Indonesia sebagai anggota Biro PBB yang bertugas menyiapkan Habitat 3 bersama dengan Negara Jerman, Ekuador, Chile, Perancis, Senegal, Slovakia dan Uni Emirat Arab. Tujuan dari dibentuknya habitat 3 adalah untuk

---

<sup>33</sup> Aspek paling penting dalam undang-undang ini menurut Moud Olivier anggota parlemen dari Partai Sosialis ialah perlindungan terhadap para PSK, dengan memberikan mereka KTP karena 85% PSK adalah korban perdagangan manusia.<sup>33</sup> Pemberlakuan Undang-undang tersebut juga mendapatkan tentangan dari anggota serikat pekerja seks komersial karena akan berdampak pada mata pencarian para PSK yang diperkirakan berjumlah 30.000 sampai 40.000 orang. Ibid. [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/04/160406\\_dunia\\_prancis\\_prostitusi\\_hukum](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/04/160406_dunia_prancis_prostitusi_hukum) diakses pada tanggal 30 Oktober 2016.

<sup>34</sup>WHO: Polusi Udara di Asia Tenggara Makin Parah, Kontan, 13 Mei 2016, <http://kesehatan.kontan.co.id/news/who-polusi-udara-di-asia-tenggara-makin-parah> diakses pada tanggal 30 Oktober 2016.

<sup>35</sup> Bernadus Djono Putro, *Agenda Baru perkotaan Indonesia*, Kompas, rabu 11 Mei 2016

menyusun strategi pembangunan kota yang berkesinambungan, melakukan evaluasi yang telah dilakukan berkaitan dengan isu pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup dan berbagai tantangan baru di perkotaan dunia yang disebut sebagai *new urban agenda*.<sup>36</sup>

Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang di Asia dan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, tengah menghadapi tantangan perkotaan yang akibat dari pertumbuhan jumlah penduduk. Pada tahun 2010, jumlah penduduk perkotaan Indonesia telah mencapai sekitar 49% dari total jumlah penduduk seluruhnya. Proporsi penduduk perkotaan Indonesia telah melampaui rata-rata proporsi penduduk perkotaan di kawasan Asia Tenggara bahkan benua Asia.

Urbanisasi tidak hanya sebagai motor penggerak ekonomi perkotaan melainkan juga memunculkan berbagai tantangan perkotaan yang memberikan pengaruh pada berkembangnya kota dan menjadikan kawasan pinggiran sebagai kawasan yang ikut bergerak menuju perkembangan kota tersebut. Wilayah Jabodetabek dan Surabaya menjadi contoh yang tidak terelakkan yang mempunyai implikasi pada wilayah sekitar Gerbangkertosusila (Gersik, Jombang, Kertosomo, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan).

Surabaya merupakan kota terbesar ke dua setelah Jakarta yang diindikasikan pada tahun 2015 akan menjadi kota berpenduduk terbanyak nomor lima di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 21,2 juta jiwa di bawah Tokyo.<sup>37</sup> Sebagai kawasan mega-urban, berbagai masalah sosial yang munculkan seiring dengan perkembangan kota telah keluar dari batas-batas

---

<sup>36</sup> Ibid. Bernadus Djono Putro, Agenda Baru perkotaan Indonesia.

<sup>37</sup> [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/04/160406\\_dunia\\_prancis\\_prostitusi\\_hukum](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/04/160406_dunia_prancis_prostitusi_hukum) diakses pada tanggal 30 Oktober 2016.

administratif wilayah kota khususnya wilayah Gerbangkertasusila. Banyak masyarakat yang berada di luar wilayah administratif bekerja di Surabaya, serta melakukan kegiatan ekonomi dan hidup sebagai warga kota Surabaya menjadi migran liar dan masuk ke sektor informal. Hadirnya penduduk yang berasal dari wilayah pinggiran kota Surabaya menjadi point penting. Kedatangan mereka akan memunculkan masalah di perkotaan apabila pemerintah kota Surabaya tidak dapat memenuhi kebutuhan pelayanan publik bagi mereka.

## **2. Urban Regime: Pendekatan dalam Melihat Politik Kota**

Untuk dapat menggambarkan dan menjelaskan kontestasi politik yang ada pada kasus revitalisasi Dolly, maka dalam kajian ini menggunakan teori yang dianggap relevan yaitu urban regime. Pada tahun 1976, telah terjadi debat di Eropa tentang teori urban regime yang telah mendominasi neo-Marxist dan neo-Weberian sebagai sebuah pendekatan untuk melihat kota sebagai bagian dari wilayah yang melaksanakan fungsi pelayanan sosial dan kesejahteraan. Sangat berbeda dengan pandangan “*The city as growth machine*” pada studi perkotaan di Amerika Serikat yang dilakukan oleh Lexion yang dipublikasikan oleh Harvey Molotch's pada tahun 1983, dimana pada saat itu Castells membawa kajian tentang radikalisme pada studi perkotaan di Eropa dan sampai saat ini dijadikan sebagai konstruksi *grand theory*. Konsep dari *urban regime* telah digunakan oleh Fainstein untuk menjelaskan lingkaran kekuasaan yang ada di administrasi dalam pemerintahan Amerika. Dan pada akhirnya kedua pendekatan tersebut sejak tahun 1980 lebih pada “*urban political economy*”.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Alan Harding, North American Urban Political Economy, Urban Theory and British Research, British Journal of Political Science, Vol. 29, No. 4 (Oct., 1999), pp. 673-698 Published by: Cambridge University Press, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/194243>, Accessed: 05-04-2016 06:54 UTC.

Secara umum Bryan T. Downes menjelaskan beberapa masalah yang berkaitan dengan perkotaan, antara lain: 1) masalah fisik; berkaitan dengan kondisi kualitas lingkungan (udara, polusi), kondisi fasilitas fisik (sekolah, tempat industri, jalan, penerangan jalan, taman, rekreasi, dan lainnya. 2) Permasalahan Manusia, yang berhubungan dengan manusia, seperti keterkaitan antara kondisi fisik dan psikologis, sikap atau perilaku, nilai-nilai dan kepercayaan – seperti mental untuk mendapatkan penghasilan, berprasangka buruk, perasaan teralienasi, ketidak berdayaan, atau deprivasi relatif. Kedua, berkaitan dengan hubungan antara tempat dan individu.

Berbeda halnya dengan yang dikatakan oleh James Q. Wilson :

*...That has argued that our knowledge about and hence our ability to solve physical problems far outdistances our willingness to deal with them. Just the opposite appears to be true of human problems – public officials appear more willing to solve these problems but as yet do not have the knowledge or the ability to deal with them. ....in new cities grow and age and their environment or physical facilities deteriorate, redevelopment decision become necessary.<sup>39</sup>*

Politik perkotaan seperti yang dijelaskan oleh Bryan T. Downs dalam bukunya *Politics, Change and Urban Crisis* akan berkaitan dengan beberapa hal, antara lain: **Pertama**, kewenangan politik yang dimiliki oleh kota, bagaimana fragmentasi kewenangan terbangun serta bagaimana kemampuan kota dalam menyelesaikan masalahnya serta kekuasaan yang menjalankan pemerintahan, siapa yang memerintah, bagaimana pemerintah berjalan serta fungsi birokrasi. **Kedua**, peran elit perkotaan dan kepercayaan massa terhadap elit dan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan perkotaan. **Ketiga**, kontrol yang berasal dari masyarakat sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mencapai tujuan bersama.

---

<sup>39</sup> Bryan T. Downes, *Politics, Change, and The Urban Crisis*, 1976, Wadworth Publishing company, California, hal. 5-6.

Untuk dapat memahami konteks yang terjadi diperkotaan, perlu terlebih dahulu memahami politik dan perubahan politik sebagai penyebab tindakan dan aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah.

*Politics is a process of authoritively deciding who gets what, when, and how. How are public policies made and implemented? What are consequences this process has for urban problem solving? Knowledge of who benefits and why, as well as what difference this makes for people and the problem they face, will facilitate both understanding why urban problems are not being solved and more effective political participation.*<sup>40</sup>

Dalam konseptualisasi politik sebagai proses, lebih melihat politik tidak hanya sebagai hasil dari sebuah kebijakan, melainkan berkaitan dengan hubungan antar variabel yang berbeda dari proses distribusi kewenangan dan kekuasaan, hak istimewa yang dimiliki oleh elit serta kepercayaan dan perilaku masyarakat.

*In this conceptualization of political process, the outcomes of each stage are not viewed as the result of a unique set of phenomena but rather of different combinations of the same general variables – the distribution and use of political authority and power, and prevailing elite and mass beliefs or attitudes.*<sup>41</sup>

Menurut Megan K. Blake, dalam bukunya yang berjudul “*Reconstructing Urban Regime Theory: Regulating Urban Politics in a Global*” menjelaskan bahwa melihat permasalahan perkotaan harus melihat juga fungsi dari pemerintah lokal dan penyelesaian masalah perkotaan serta bagaimana pemerintah mampu membangun koalisi, konsolidasi, melaksanakan hegemoni serta transformasi. *Urban regime theory argues that there is an ebb and flow to the functions of local government and the way urban places are governed by focusing on how coalition emerge, consolidate, become hegemonic, and then devolve or transform.*<sup>42</sup>

### 3. Analisis

---

<sup>40</sup> Ibid. Bryan T. Downes hal. 19.

<sup>41</sup> Ibid, Bryan T. Downes, hal. 25

<sup>42</sup> Megan K. Blake, *Reconstructing Urban Regime Theory: Regulating Urban Politics in a Global*, Book Reviews Book Reviews Book Reviews Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 1997.

Surabaya merupakan kota multi etnis seperti etnis Melayu, Cina, India, Arab, Madura, Sunda, Batak, Kalimantan, Bali, Sulawesi yang membaaur dengan penduduk asli Surabaya dan membentuk pluralisme budaya dan ciri khas kota Surabaya. Mayoritas masyarakat Surabaya adalah orang Surabaya asli dan orang Madura yang mempunyai ciri khas mudah bergaul dengan gaya bicara sangat terbuka. Kota Surabaya yang mengalami perkembangan pesat. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,2% setahun memberikan implikasi terhadap kebutuhan perumahan yang sangat besar<sup>43</sup>.

Diberlakukannya kebijakan otonomi daerah memberi kesempatan kepada pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Surabaya untuk membangun wilayah dan masyarakatnya secara mandiri dari segi finansial dan politik serta menumbuhkan kepekaan elit politik, para perencana pembangunan, dan dinas yang ada agar makin sensitif terhadap permasalahan sosial di tingkat lokal, dan segera menanganinya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Pentingnya peran elit politik, dinas terkait, legislatif, pengusaha, ormas serta masyarakat dalam penataan kota menjadi hal penting untuk dikaji.

Terpilihnya Tri Rismaharini-Bambang DH pada tahun 2010 melalui pemilihan langsung dengan memperoleh suara 358.187 suara atau 38.53%<sup>44</sup> telah menempatkan Tri Rismaharini menjadi perempuan yang berpengaruh di Surabaya. Posisi Walikota Surabaya telah memberikan ruang untuk melakukan terobosan dalam programnya seperti: upaya mengurangi papan reklame, menghijaukan taman Surabaya melalui program taman hijau atau ruang terbuka hijau, penutupan lokalisasi Dolly, menolak proyek jalan tol, sampai menata kebun binatang. Dua

---

<sup>43</sup> [www.surabaya.go.id](http://www.surabaya.go.id), diakses pada 11 November 2016.

<sup>44</sup> 10 Fakta yang belum terungkap tentang walikota Surabaya DR.(H.C) IR.Tri Rismaharini, <http://beritasepuluh.com/2015/10/19/10-fakta-yang-belum-terungkap-tentang-walikota-surabaya>, 19 Oktober 2015, diakses pada 12 Pebruari 2016.

program yang menarik untuk dikaji dalam melihat kepemimpinan Tri Rismaharini adalah; Program Revitalisasi Kampung Dolly dan Program ruang terbuka hijau.

Kasus Dolly mendapat perhatian masyarakat dan media. Keberhasilan program penutupan Dolly melalui Revitalisasi Kampung Dolly yang dilaksanakan pada tahun 2014 sudah lama ditunggu sejak dikeluarkan Perda Kotamadya Tingkat II Nomor 7 Tahun 1999. Risma melalui program Revitalisasi Kampung Dolly telah berhasil menutup lokasi prostitusi tersebut. Program tersebut sebagai bagian dari upaya membangun wajah kota Surabaya yang lebih humanis dengan berbagai konflik kepentingan yang ada.

Program Revitalisasi Kampung Dolly menjadi model penanganan kawasan prostitusi yang dapat menggambarkan kebijakan pemerintah kota Surabaya dalam menempatkan wajah perkotaan. Dolly mempunyai permasalahan yang lebih rumit, baik dari sisi ekonomi, sosial maupun budaya perkotaan. Menata kembali wilayah Dolly menjadi kampung kreatif merupakan terobosan yang cerdas dalam menyikapi permasalahan perkotaan. Memposisikan manusia lebih beradab dan manusiawi.

Prostitusi adalah suatu masalah sosial yang sulit untuk diatasi. Kemunculan prostitusi disebabkan karena kesulitan ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan, serta faktor karakter “malas” yang menjadi alasan utama tetap hidupnya prostitusi. Hal ini yang menjadi alasan utama Pekerja Seks Komersial dan orang-orang yang mendapat keuntungan yang telah membangun industri besar di dalamnya.

Lokalisasi Dolly berada di kawasan Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kotamadya Surabaya. Tepatnya, kompleks pelacuran ini berlokasi di Jalan Kupang Gunung Timur V Raya. Kalau Jalan Tunjungan dianggap sebagai

pusat atau jantung Kota Surabaya. Dolly terletak tidak jauh dari pusat kota Surabaya. Perkembangan kegiatan prostitusi di Kota Surabaya dewasa ini sudah sangat memprihatinkan. Upaya penindakan juga telah lama dilakukan oleh Pemkot Surabaya.

Upaya pelarangan prostitusi sendiri telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan ditetapkan pada tanggal 11 Mei 1999 merupakan peraturan tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila serta pemikatan untuk melakukan perbuatan asusila di Surabaya. Larangan tersebut terdapat pada Bab II: Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat Untuk Perbuatan Asusila, Pasal 2: Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya setiap orang dilarang: a) menggunakan bangunan/tempat untuk melakukan perbuatan asusila; b) melakukan perbuatan pemikatan untuk berbuat asusila<sup>45</sup>

Surabaya melarang semua kegiatan maupun praktik asusila, baik yang dilakukan di jalan-jalan yang secara bebas dapat dikunjungi oleh semua orang maupun di tempat atau bangunan yang permanen, semi permanen maupun tidak permanen, terbuka atau terselubung. Pemerintah Kota Surabaya juga telah berupaya untuk menghentikan kegiatan tersebut melalui Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2001. Namun, belum berhasil. Akhirnya Pemerintah Kota Surabaya merencanakan menutup lokalisasi pada tanggal 18 Juni 2014 sebelum memasuki bulan Ramadhan.

Proses penutupan Dolly mendapatkan tentangan dari PDI-P yaitu partai politik yang mengusung Tri Rismaharini sebagai Walikota Surabaya terpilih.

---

<sup>45</sup> Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya, Nomor 7 tahun 1999 Tentang: Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat untuk Perbuatan Asusila Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Menurut Wakil Walikota Wisnu sakti Buana, bahwa penolakan penutupan Dolly bukan kepentingan pribadinya melainkan konsep PDIP dalam melihat realitas sosial prostitusi di Dolly;

“kami tidak pernah memiliki rencana menutup Dolly, yang ada hanyalah pembatasan PSK dan pembatasan aktivitas prostitusi.... PDIP sebagai partai yang berbasis wong cilik sangat sadar, secara ekonomi puluhan ribu warga sudah sangat bergantung pada aktivitas lokalisasi Dolly. Fakta itu sudah berlangsung puluhan tahun sejak Dolly ada sekitar tahun 1966.”<sup>46</sup>

Begitu juga dengan tim advokasi Front Pekerja Lokalisasi (FPL) Dolly yang menilai bahwa penutupan tersebut melanggar UU No.2 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah:

“Menutup lokalisasi Dolly tidak boleh dilakukan sebelum perekonomian warga terdampak mapan. ....jadi Pemkot harus memperhatikan UU terlebih dahulu jika tidak ingin memiliki masalah hukum di kemudian hari nanti”. Tidak masuk akal jika keberadaan lokalisasi memicu kriminalitas.Itu hanya pemkot yang membuat opini buruk soal Dolly<sup>47</sup>.

Penutupan Dolly juga mengakibatkan adanya perlawanan dari para PSK yang didukung oleh kelompok yang secara ekonomi tergantung pada lokalisasi diantaranya; preman, gremo dan pedagang.<sup>48</sup>Upaya penutupan Dolly mendapat respon dari komisi D-DPRD Kota Surabaya.Komisi D belum diajak untuk mendiskusikan masalah terkait penutupan Dolly.DPRD memberikan saran untuk memperhatikan langkah setelah penutupan.Sehingga penutupan Dolly diharapkan tidak menimbulkan masalah baru seperti yang telah terjadi pada penutupan lokalisasi sememi dengan modus baru (rumah karaoke, kos-kosan).Untuk itu harus ada kerjasama yang kuat antara walikota dan wakilnya.Di sisi lain, bentuk dukungan untuk penutupan Dolly diberikan oleh Ormas Islam, walaupun Forum dakwah Islam Indonesia (FDII) Jawa Timur sudah meminta berbagai ormas tidak

---

<sup>46</sup>Kompas.com, Penolakan penutupan dolly adalah konsep PDI-P, 01 Juni 2014.

<sup>47</sup> Sindonews.com, Tutup Dolly, pemkot Surabaya Langgar UU, Jumat, 30 Mei 2014, diakses 11 Nopember 2016

<sup>48</sup> Republika.co.id, Perlawanan Dolly, 24 Juni 2014.

diperbolehkan ikut campur terkait penutupan gang Dolly. Hal ini disampaikan oleh ketua FDII Jatim, H. Alibadri: “ Serahkan semuanya ke satpol PP dan kepolisian. Sebagai pihak yang berwajib, mereka yang mempunyai kewajiban melakukan penutupan.”<sup>49</sup>

Deklarasi penutupan lokalisasi Dolly berlangsung di Gedung *Islamic Center* Surabaya, pukul 19.00 WIB dan dihadiri banyak kalangan, antara lain: sejumlah ulama, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani. Ada 107 warga Putat Jaya yang menandatangani deklarasi penutupan sentra prostitusi Dolly. Deklarasi itu memuat empat poin utama: **Pertama**, warga menyepakati kawasan Putat Jaya bebas prostitusi. **Kedua**, alih profesi dibidang lain yang sesuai dengan tuntunan agama dan peraturan. **Ketiga**, mendukung penindakan tegas terhadap pelaku trafficking atau perdagangan orang. **Keempat**, siap membangun kawasan Putat Jaya menjadi daerah yang lebih aman, maju, dan makin baik dengan bimbingan pemerintah.

Tabel.2 Kepentingan dan Konflik Dalam Kasus Revitalisasi Kampong Dolly

No	Posisi	Nama Aktor	Pernyataan dan sikap
1	Menolak	Ketua PDIP Surabaya, Wakil Walikota Surabaya : Wisnu Sakti Buana	Penolakan tempat maksiat itu merupakan sikap resmi PDI-P dalam melihat realitas sosial prostitusi di Dolly.
2	Mendukung	58 Ormas Islam yang tergabung dalam Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jawa Timur	Mendukung ibu walikota untuk menutup tempat-tempat prostitusi
3	Menolak	Front Pekerja Lokalisasi (FPL): PSK, Mucikari, masyarakat sekitar	Kami menolak penutupan dan menolak segala bentuk diskriminasi dan intimidasi

<sup>49</sup>Viva.co.id, Surabaya dipimpin Singa Betina, Dolly Akhirnya di tutup, Rabu, 18 Juni 2014.

(pedagang kaki lima, buruh yang tujukan kepada lokalisasi Dolly. cuci, tukang becak)

- |   |           |   |  |
|---|-----------|---|--|
| 4 | Mendukung | Febria Rachmanita,<br>Kadinkes Surabaya | Jumlah rakyat di kompleks Dolly yang terkena HIV jumlahnya sudah mencapai 300 orang lebih. Mengapa Dolly tidak boleh ditutup   |
| 5 | Netral    | Komnas HAM                              | Posisi Komnas HAM tidak dalam posisi mendukung atau menolak. Komnas HAM hanya ingin memastikan tidak ada pelanggaran HAM yang dilakukan Pemkot selama penutupan dilakukan. Dan memfasilitasi dialog. |

Sumber: Dari berbagai Media.

Walaupun Dolly telah dideklarasikan ditutup, lokalisasi tertua yang masih eksis di Surabaya tersebut tetap buka seperti biasa. Hanya, penjagaan cukup ketat itu dilakukan untuk menghindari gerebekan aparat. Di gang utama Dolly, di antara 56 wisma, tercatat hanya empat yang tutup, yakni: Wisma Sumber Rejeki, Wisma Lancar Jaya, dan dua wisma yang disebut-sebut terbesar di Dolly, yakni, Wisma Barbara dan Wisma New Barbara.

Setelah menutup lokalisasi Dolly, Pemerintah Kota berupaya mengelola warga yang terdampak, mereka yang memenuhi syarat disalurkan ke instansi-instansi pemkot sebagai pegawai. Adapun para PSK yang menerima bantuan stimulan Rp.5.050.000,- berdasarkan sumber koran, berjumlah 164 orang, dan mucikari 29 orang. Jumlah ini baru sebagian kecil dari total PSK 1.449 orang dan 311 mucikari. PSK yang memperoleh bantuan dikembalikan ke tempat asal mereka.

#### **4. Kesimpulan**

Untuk menjelaskan permasalahan perkotaan harus melihat juga fungsi dari pemerintah lokal dan pola penyelesaian masalah perkotaan serta bagaimana pemerintah mampu membangun koalisi, konsolidasi, melaksanakan hegemoni serta transformasi. Kasus penutupan Dolly dan melakukan revitalisasi kampung merupakan pola penanganan perkotaan yang didasarkan pada kompromi dan kepentingan masyarakat.

Elit lokal dalam hal ini walikota Surabaya telah melakukan tindakan tegas untuk menutup dolly dengan diiringi program pemberdayaan ekonomi bagi mantan PSK yang mau bergabung dengan program tersebut. Bekerjasama dengan instansi terkait, Bu Risma juga melakukan program pendampingan ekonomi bagi masyarakat yang ada di sekitar Dolly. Program ini diharapkan mampu mendorong bergeraknya perekonomian masyarakat sekitar yang dulu tergantung dengan Dolly. Program tersebut bertujuan untuk mengubah wajah kota Surabaya menjadi lebih humanis.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Andranovich, Gregory.D, Doing Urban Research, applied social research series, Sage Publication, 1993.

Budiardjo, Mirriam, Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa, Sinar harapan, Jakarta, 1984

Castells, Manuel, City, Class and Power, The Mac Milland Press, Kondon, 1987.

Cullingworth, J.B, Problem of an Urban Society, Volume 2: The Social Content of Planning, University of Brimingham, Tahun 1972.

Downes, Bryan T, Politics, Change, and The Urban Crisis, 1976, Wadworth Publishing company, California.

- Denzin, Norman K, *Handbook of qualitative research*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Herlianto, Urbanisasi, Pembangunan dan Kerusakan Kota Bandung,, PT Alumni, 1997.
- Heywood, Andrew, Politik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Le Gates, Ricgard T. *The City reader*, Rautledge, Canada, 2000.
- Poloma, Margaret M., 1994. *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta, raja Grafindo Persada.
- Ritzer, Georger, *Teori Sosial Modern*, Penerbit Kencana, Prenada Media, Rawamangun, Jakarta 2004.

**Jurnal:**

- Allan daramawan, Konstalasi Politik Kota Dalam Kebijakan Reklame di Surabaya, *Jurnal Politik Muda*, Vol.1 No.1 Oktober-Desember 2012.
- Akhmad Ramdhon, Sketsa Elit dan Fragmen Ekonomi Politik Kota, *Jurnal Sosiologi Dilema*, ISSN: 0215-9635, Vol. 25 No. 2 Tahun 2010.
- Alan Harding, North American Urban Political Economy, *Urban Theory and British Research*, *British Journal of Political Science*, Vol. 29, No. 4 (Oct., 1999), pp. 673-698, Cambridge University Press, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/194243>, Accessed: 05-04-2016 06:54 UTC.
- Ash Amin and Stephen Graham, The Ordinary City, *Transactions of the Institute of British Geographers*, Vol. 22, No. 4 (1997), pp. 411-429, The Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers), URL: <http://www.jstor.org/stable/623110>, Accessed: 05-04-2016 07:04 UTC.
- Abdou Maliq Simone, The Urban Poor and Their Ambivalent Exceptionalities Some Notes from Jakarta, *Source: Current Anthropology*, Vol. 56, No. S11, *Politics of the Urban Poor: Aesthetics, Ethics, Volatility, Precarity* (October 2015), pp. S15-S23, Published by: The University of Chicago Press on behalf of Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/10.1086/682283>, Accessed: 05-04-2016 06:17 UTC.
- Cynthia Horan and Andrew E. G. Jonas, *Governing Massachusetts: Uneven Development and Politics in Metropolitan Boston*, *Economic Geography*, Vol. 74, Special Issue for the 1998 Annual Meeting of the Association of American Geographers, Boston, Massachusetts, 25-29 March 1998 (1998), pp.83-95, Clark University, URL: <http://www.jstor.org/stable/144305>, Accessed: 05-04-2016 06:55 UTC.

- Dimitra Viantari, Delik Hudalah, Globalisasi dan Politik Perkotaan dalam Suburbanisasi di Kawasan Metropolitan Jabodetabek, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota SAPPK*.
- David C. Gibbs, Andrew E. G. Jonas, Suzanne Reimer and Derek J. Spooner, Governance, Institutional Capacity and Partnerships in Local Economic Development: Theoretical Issues and Empirical Evidence from the Humber Sub-Region, *Transactions of the Institute of British Geographers*, Vol. 26, No. 1 (2001), pp. 103-119, Wiley on behalf of The Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers), URL: <http://www.jstor.org/stable/623147>, Accessed: 05-04-2016 06:59 UTC.
- David L. Imbroscio, David L. Imbroscio, Baker. Chapters 9-11 on Chicago stand in contrast, for they demonstrate the limits of progressive reform efforts, *The Journal of Politics*, Vol. 58, No. 3 (Aug., 1996), pp. 885-887, The University of Chicago Press on behalf of the Southern Political Science Association, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2960457>, Accessed: 05-04-2016 06:56 UTC.
- Dorothy Shipps, Pulling Together: Civic Capacity and Urban School Reform, Source: *American Educational Research Journal*, Vol. 40, No. 4 (Winter, 2003), pp. 841-878, American Educational Research Association, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3699410>, Accessed: 05-04-2016 06:57 UTC.
- Gerry Stoker, Theory and Urban Politics, *International Political Science Review / Revue internationale de science politique*, Vol. 19, No. 2, *New Trends in Municipal Government. Le gouvernement des villes: nouvelles tendances* (Apr., 1998), pp. 119-129, Sage Publications, Ltd, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1601319>, Accessed: 05-04-2016 06:55 UTC.
- Huey L. Perry, Huey L. Perry, Race, Power, and Political Emergence in Memphis, *The Journal of Politics*, Vol. 65, No. 1 (Feb., 2003), pp. 274-275, The University of Chicago Press. <http://www.jstor.org/stable/10.1111/1468-2508.00012>, Accessed: 05-04-2016 06:57 UTC.
- Harini Amarasuriya and Jonathan Spencer, "With That, Discipline Will Also Come to Them" The Politics of the Urban Poor in Postwar Colombo, Source: *Current Anthropology*, Vol. 56, No. S11, *Politics of the Urban Poor: Aesthetics, Ethics, Volatility, Precarity* (October 2015), pp. S66-S75, Published by: The University of Chicago Press on behalf of Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/10.1086/681926>, Accessed: 05-04-2016 06:14 UTC.
- Haryanto, Elit Politik Lokal Dalam Perubahan Sistem Politik, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 13, Nomor 2, November 2009 (131-148), ISSN 1410-4946.

- Kevin G. Ward, The Re-Interpretation of Urban Politics: Three Authors, Four Papers and the 'Shibboleth of Regulation Theory', Transactions of the Institute of British Geographers, Vol. 26, No. 1 (2001), pp. 127-133, Wiley on behalf of The Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers), Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/623149>, Accessed:05-04-2016 07:03 UTC.
- Kevin J. Delaney and Rick Eckstein, Urban Power Structures and Publicly Financed Stadiums, Source: Sociological Forum, Vol. 22, No. 3 (Sep., 2007), pp. 331-353, Published by: Wiley, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/20110215>, Accessed: 05-04-2016 06:55 UTC.
- Larry R. Ford, A Model of Indonesian City Structure, Source: Geographical Review, Vol. 83, No. 4 (Oct., 1993), pp. 374-396, Published by: American Geographical Society, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/215821>, Accessed: 05-04-2016 06:34 UTC.
- Lewis A. Coser, *Social Conflict and Theory of Social Change*, The British Journal of Sociology, Vol.8, No.3 (Sep.,1957), pp. 197-207
- Megan K. Blake, Reconstructing Urban Regime Theory: Regulating Urban Politics in a Global, Book Reviews Book Reviews Book Reviews Thousand Oaks, Calif, Sage, Publications, 1997, Megan K. Blake, Megan K. Blake, Economic Geography, Vol. 75, No. 4 (Oct., 1999), pp. 419-420, Clark University, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/144479>, Accessed: 05-04-2016 06:52 UTC.
- Meredith Ramsay, Community, Culture and Economic Development: The Social Roots of Local Action. Albany:State University of New York Press, 1996. 163p, Gerry Stoker, University of Strathclyde at Glasgow, Author(s): Gerry Stoker, Gerry Stoker, The American Political Science Review, Vol. 90, No. 4 (Dec., 1996), pp. 920-921, American Political Science Association Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2945888>, Accessed: 05-04-2016 07:03 UTC.
- Nari Rhee, The Social Construction of Reality, Review, Transactions of the Institute of British Geographers, Vol. 25, No. 3 (2000), pp. 398-400, Published The Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers), Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/623260>, Accessed:05-04-2016 07:02 UTC.
- Roger Keil, Globalization Makes States: Perspectives of Local Governance in the Age of the World City, Source: Review of International Political Economy, Vol. 5, No. 4 (Winter, 1998), pp. 616-646, Published by: Taylor & Francis, Ltd, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/4177290>, Accessed: 05-04-2016 07:00 UTC.
- Shenjing He and Desheng Xue, Identity Building and Communal Resistance against Landgrabs in Wukan Village, China, Source: Current

Anthropology, Vol. 55, No. S9, Crisis, Value, and Hope: Rethinking the Economy ( August 2014), pp. S126-S137, Published by: The University of Chicago Press on behalf of Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research, Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/10.1086/676132>, Accessed: 05-04-2016 06:20 UTC.

Siti Aminah, Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya, Lab Sosio, Pusat Kajian Sosiologi FISIP-UI, September 2015.

Terry D. Clark, Who Rules Šiauliai? A Case Study of an Emerging Urban Regime, Source: Slavic Review, Vol. 56, No. 1 (Spring, 1997), pp. 101-122, Published by: Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2500657>, Accessed: 05-04-2016 06:59 UTC.

Todd Swanstrom, Semisovereign Cities: The Politics of Urban Development, Source: Polity, Vol. 21, No. 1 (Autumn, 1988), pp. 83-110, Published by: The University of Chicago Press, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3234925>, Accessed: 05-04-2016 07:05 UTC.

Timothy Carter, C. Rhett Jackson, Amy Rosemond, Cathy Pringle, David Radcliffe, William Tollner, John Maerz, David Leigh and Amy Trice, Beyond the urban gradient: barriers and opportunities for timely studies of urbanization effects on aquatic ecosystems, Source: Journal of the North American Benthological Society, Vol. 28, No. 4 (Dec., 2009), pp. 1038-1050, Published by: The University of Chicago Press on behalf of the Society for Freshwater Science, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/10.1899/08-169.1> Accessed: 05-04-2016 06:25 UTC.

Pengajuan izin IMB dan Reklame Surabaya, <http://news.detik.com/berita-jawa-timur>, Selasa, 06 September 2016.

Dicky Dwi Ananta, Perjuangan kelas menengah reklamih ha katas kota, <http://indoprogress.com/2014/03>, 15 Maret 2014.

Berdardus Djonoputro, Agenda Baru Perkotaan Indonesia?, Kompas, Rabu 11 Mei 2016.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor: 68 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Terhadap program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2015.

UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No.7 Tahun 1999 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila serta pemikatan untuk melakukan perbuatan asusila di Surabaya.

Chusnul,Mar'iyah (disertasi), 1998, Urban Political conflict in Australia: The Redevelopmen of inner Sydney, Department of Governments the University of Sydney, 1998.

### **Bibliografi**

**Lusi Andriyani.** Lahir di Lamongan 1 Februari 1978. Menyelesaikan pendidikan SD dan SMP di Glagah Lamongan Jawa Timur dan SMA Negeri 1 Magetan Jawa Timur. Jenjang S1 dan S2 di selesaikan di Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya.Mulai tahun 2010 sampai dengan 2013 sudah ada 5 penelitian hibah dikti yang diperoleh dan tahun 2014-2015 terdapat 4 karya yang di HAKI kan. Pada tahun 2015 mendapat penghargaan sebagai dosen produktif di UMJ.Sekarang sedang menempuh Program Doktor Ilmu Politik di Universitas Indonesia.

### **CURICULUM VITAE**

- 1 Nama Lengkap (dengan Lusi Andriyani, SIP.,M.Si gelar)
- 2 Jabatan Fungsional Lektor
- 3 Jabatan Struktural Penata Muda /IIIc
- 4 NIP/NIK/Identitas lainnya 1978002012005012001
- 5 NIDN 0001027801
- 6 Tempat dan Tanggal Lahir Lamongan, 01 Pebruari 1978
- 7 Alamat Rumah Perum. Nerada Estate B7/6 Cipayung, Ciputat, Tangsel
- 8 Nomor Telepon/Faks/HP 081313188240
- 9 Alamat Kantor Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat
- 10 Nomor Telepon/Faks 021-7445658 / 021-74709730
- 11 Alamat e-mail [lusilamong@gmail.com](mailto:lusilamong@gmail.com)/ lusi.umj.ac.id
- 12 Lulusan yang telah S1= 4 orang S2= ....orang S3=.....orang dihasilkan
- 13 Matakuliah yang diampu
  1. Metodologi Ilmu Politik
  2. Pembangunan Politik
  3. Sistem Politik dan Pemerintahan AS
  4. Pengantar Ilmu Politik

## 5. Identitas dan Multikultur

### Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Airlangga Surabaya	Universitas Surabaya	Airlangga
Bidang Ilmu	Politik	Politik	
Tahun Masuk - Lulus	1996 - 2000	2006 - 2008	
Judul Skripsi/Thesis	Politik Pangan dan Kesejahteraan Petani	Islam dan Politik Sejahtera	Identitas: studi pad Partai Keadilan
Nama Pembimbing	Dr. Aminah.,MA.,	Siti Dra. BLS. Wardhani.,PhD	

### Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2010/2011	Pemodelan politik Identitas Pada Partai Politik Dalam Mendukung Penciptaan Kehidupan demokrasi Tanpa Kekerasan	Hibah DIKTI	35.500.000
2	2010/2011	Pemodelan politik Identitas Pada Partai Politik Dalam Mendukung Penciptaan Kehidupan demokrasi Tanpa Kekerasan	Hibah DIKTI	35.500.000
3	2008/2009	Pengembangan model representasi perempuan dalam media : Studi kesetaraan gender pada Reality Show tema cinta di televisi untuk meningkatkan martabat perempuan (Didanai DIKTI)	Hibah DIKTI	35.000.000 (+)
4	Semester ganjil 2012/2013	Penelitian desentralisasi kategori Hibah Bersaing dengan judul : Pola Pengembangan Model Identitas kota (City Branding) sebagai marketing value dalam era otonomi daerah	Surat No: 685/LPPM-UMJ/2013 Daftar peneliti desentralisasi yang didanai oleh kemendikbud tahun 2013	50.000.000
5	2013	Penelitian desentralisasi kategori unggulan PT dengan judul:	surat no: 921/LPPM-UMJ/XII/2013	65.000.000,-

Pengembangan model pendidikan tentang seminar dan pelatihan gender sebagai upaya kelayakan penelitian untuk mendukung pelaksanaan clean lanjuatan 2014 dan and good governance bagi aparat lampiran pemenang pemerintahan desa di kota hibah penelitian Tangerang Selatan desentralisasi 2014  
UMJ

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan Sumber	Jumlah (Rp)
1	2007	Program life skill jahit sepatu		
2	2009	Pendamping KKN Mahasiswa	UMSIDA	
3	2010	Program pengembangan POSDAYA	Damandiri dan UMSIDA	
	Semester ganjil 2012/2013	Mitra Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan verifikasi Faktual Partai Politik Peserta pemilu selama dua bulan dengan efektif kinerja 24 hari (8 jam x 24= 192 jam)	Keputusan Badan Pengawas Pemilu No. 646-KEP Tahun 2012 tentang pengangkatan Mitra Pengawas Pemilu Dalam Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta PEMILU Tahun 2014 dan kesepahaman bersama antara BAWASLU ddengan Perguruan Tinggi no:004/BAWASLU/KB/IX /2012	
	semester ganjil 2012/2013	Pengurus LAZISMU Universitas Muhammadiyah Jakarta	Keputusan Rektor UMJ No: 310 Tahun 2012 tentang pengangkatan pengurus lembaga zakat, infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Universitas Muhammadiyah Jakarta	
	2015	Abdimas: IbM kelompok Usaha Bersama Kacang Sangrai Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan	Kemenristek DIKTI anggaran 2015	40.000.000, -
	2015	Pendamping Mahasiswa KKN	FISIP UMJ	

	2014				
2015	Pendamping	Mahasiswa	KKN	FISIP	UMJ
	2015				
2016	Pendamping	Mahasiswa	KKN	FISIP	UMJ
	2016				

#### **Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir**

<b>No</b>	<b>Judul Artikel Ilmiah</b>	<b>Volume/Nomor/Tahun</b>	<b>Nama Jurnal</b>
1	Budaya dan Politik Lokal : Sebuah Wacana Pascakolonial	Jurnal KALAMSIASI Vol. 1 No. 1 Maret 2008 ISSN 1412-7695	KALAMSIASI
2	Persepsi masyarakat terhadap perilaku menyimpang anggota DPRD: Studi kasus penyimpangan penggunaan anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo 1999 - 2004	Jurnal KALAMSIASI Vol. 2 No.1 Maret 2009 ISSN 1412-7695	KALAMSIASI
3	Primordialisme dan munculnya Islam dalam politik Indonesia	Jurnal KALAMSIASI Vol. 2 No.2 Hlm.103-204 September 2009 ISSN 1412-7695	KALAMSIASI
4	Identitas Politik dan Politik Identitas	Jurnal Kalamsiasi Vol.3 No.1 Hlm.79-88 Maret 2010 ISSN 1412-7695	KALAMSIASI
5	Model Politik identitas pada partai politik dalam menciptakan demokrasi tanpa kekerasan	2011	KOMTI
6	Penulis di jurnal Demokrasi edisi tahun 2013,ISSN: 2252-3030 dengan judul : Pola Pengelolaan Konflik Partai Politik	2013	Jurnal Demokrasi
7	Hizbut Tahrir Indonesia dan Eksistensi Fundamentalisme	Jurnal Kajian Vol.24 No. 2 jakarta, Juli 2013, ISSN: 0856-6060	KAJIAN
8	Pergeseran Penguasaan Ekonomi Ke Penguasaan Politik	Jurnal Kajian Vol. 25 No.11 Jakarta, januari 2014, ISSN: 0856-6060	KAJIAN

#### **Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir**

<b>No</b>	<b>Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar</b>	<b>Judul Artikel Ilmiah</b>	<b>Waktu dan Tempat</b>
1	Workshop penyusunan proposal PKM	Trik menyusun	2008, Universitas

		proposal	Muhammadiyah Sidoarjo
2	Workshop penyusunan proposal PKM	Trik proposal	menyusun 30-31 Agustus 2010, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
3	Pemateri LDKM FISIP UMJ dengan judul Teknik Pembuatan Proposal, guest house UMJ, 14 Desember 2012. Surat permohonan pemateri no: 11/B/PAN.LDKM/FISIP.UMJ/XI/2012 dan surat tugas no: 106/F.1-UMJ/XII/2012 tentang Pemateri LDKM FISIP UMJ	Teknik Proposal	Pembuatan guest house UMJ, 14 Desember 2012
4	Peserta seminar nasional menuju the fifth Bali regional ministerial conference (BRMC V), oleh direktorat keamanan nasional, 14 Pebruari 2013	Surat tugas no: 15/F.1-UMJ/II/2013 tentang peserta seminar BRMC "V"	semester ganjil 2012/2013
5	Peserta sosialisasi KKNI di Fakultas Teknik UMJ, 15 Januari 2013	Surat tugas no: 136/F.1-UMJ/I/2013 tentang peserta sosialisasi KKNI	semester ganjil 2012/2013
6	Peserta FGD FISIP UIN Syarif Hidayatullah dengan IC3D	Surat tugas no: 37/F.1-UMJ/XI/2012 tentang peserta FGD FISIP UIN Syarif Hidayatullah	semester ganjil 2012/2013
7	Panitia kuliah umum peranan etika dalam berbangsa dan bernegara FISIP UMJ, 24 September 2012	surat tugas no: 97/F.1-UMJ/IX/2012 tentang panitia kuliah umum peranan etika dalam berbangsa dan bernegara FISIP UMJ	semester ganjil 2012/2013
8	Tim pelaksana penyusunan dan pengelolaan jurnal kajian ilmu-ilmu sosial FISIP UMJ sebagai anggota dewan redaksi	SK Dekan FISIP UMJ No: 36 Tahun 2013 tentang penunjukan pelaksana penyusunan dan pengelolaan jurnal kajian ilmu-ilmu sosial FISIP UMJ	semester ganjal 2013/2014
9	Anggota tim penyusunan borang akreditasi program studi ilmu kesejahteraan sosial FISIP UMJ	SK Dekan FISIP UMJ No: 32 tahun 2013 tentang tim	

- penyusunan borang akreditasi program studi ilmu kesejahteraan sosial FISIP-UMJ
- 10 Anggota panitia Milad ke 52 FISIP UMJ SK Dekan FISIP UMJ No: 22 tahun 2013 tentang pengangkatan panitia milad ke 52 dan temu akbar alumni FISIP UMJ
- 11 Koordinator bidang kerjasama dalam panitia promosi penerimaan mahasiswa baru FISIP UMJ tahun 2014 SK Dekan FISIP UMJ No: 33 tahun 2013 tentang panitia promosi penerimaan mahasiswa baru program strata satu FISIP UMJ tahun 2014
- 12 Peserta seminar sosialisasi proposal desentralisasi dan kompetitif nasional tahun 2014 Surat tugas dekan FISIP UMJ No: 19/F.1-UMJ/III/2013 tentang tugas menghadiri acara sosialisasi usulan proposal desentralisasi dan kompetitif nasional tahun 2014
- 13 Peserta workshop penilaian prestasi kerja bagi dosen PNS DPK Kopertis Wilayah III Jakarta Surat tugas Rektor No: 135/R1-UMJ/XI/2013 tentang peserta acara workshop penilaian prestasi kerja bagi dosen PNS DPK Kopertis wilayah III Jakarta
- 14 Anggota Pengelola Pusat Kajian Politik dan Hubungan Internasional FISIP UMJ SK Dekan FISIP UMJ No: 34 tahun 2013 tentang penunjukan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan pusat kajian politik dan

- hubungan  
internasional FISIP  
UMJ
- 15 Panitia penyelenggara ujian pada semester ganjil 2013/2014 FISIP UMJ SK Dekan FISIP No: 31 tahun 2013 tentang penyelenggaraan ujian bagi mahasiswa FISIP UMJ pada semester ganjil 2013/2014
- 16 Peserta pelatihan penyusunan proposal Abdimas LPPM UMJ bekerjasama dengan Kemendikbud tgl 3-4 Oktober 2013 Surat tugas Dekan FISIP UMJ No: 19/F.1-UMJ/III/2013 tentang sosialisasi usulan proposal program abdimas
- 17 Peserta sosialisasi penegakan kode etik dan kerjasama dengan PT tanggal 26 November 2013 di Grand Sahid Jaya-Jakarta Surat tugas Dekan FISIP UMJ No: 52/F.1-UMJ/XI/2013 tentang tugas menghadiri acara sosialisasi kode etik dan kerjasama dengan PT
- 18 Participant international conference : internalization of islamic higher education, 11-10 December 2013, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Surat tugas Dekan FISIP UMJ No: 18/F.1-UMJ/XII/2013 tentang tugas menghadiri acara konferensi internasional pendidikan islam di UIN syarif hidayatullah
- 19 Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Keputusan Rektor No. 31 tahun 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan ketua program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta

- |    |   |  |                                 |
|----|---|--|---------------------------------|
| 20 | Pengurus Sentra Hak Kekayaan Intelektual Universitas Muhammadiyah Jakarta : Divisi Manajemen Pemasaran  | Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No: 313 tahun 2012 tentang perubahan struktur organisasi dan pengangkatan pengurus sentra HAKI UMJ |                                 |
| 21 | Development Models of Gender Education and Training to Support the Implementation of the Clean and Good Governance for Officials of Village Government in South Tangerang | <i>International Multidisclipinary Conference- Proceeding</i>  | UMJ                             |
| 22 | IbM Kelompok Usaha Bersama Kacang Sangrai, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan  | PKMCSR: Konferensi Nasional pengabdian Masyarakat dan Corporate Social Responsibility 2015, tanggal 21 oktober 2015                                  | Universitas Multimedia Nasional |

#### **Pengalaman penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	penerbit
1	Politik Identitas	2012	200	UMSIDA Press
2	Manual prosedur Politik Identitas	2012	20	UMSIDA Press
3	Pedoman Kemahasiswaan	2010	75	UMSIDA Press
4	Modul Manajemen Sederhana bagi Usaha Kecil tentang kemasan dan Merk	2015	20	UMJ Press
5	Buku Panduan Simulasi PUG Dalam Pembangunan	2014	39	LPPM UMJ
6	Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan	2015	70	UMJ Press
7	Pola Marketing Politik Lembaga Survei dan Demokrasi di Indonesia	2015	138	UMJ Press
8	Sinergi Perguruan Tinggi Dan Dunia Usaha Untuk Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan	2015	266	UMN Press

**Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir**

No	Judul HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Merek: Kacang sangrai Keranggan	2015	Merek	D002015046150
2	Pemodelan Pengelolaan Konflik Pada Ormas Islam Dalam mendukung Penciptaan Kehidupan Demokrasi Tanpa Kekerasan	2014	HAKI	C00201403302
3	Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	2015	HAKI	C00201504141
4	Panduan Simulasi PUG Dalam Pembangunan	2014	HAKI	C002014034390

**Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul/Tema/jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1	Pendidikan PUG	2015	Kecamatan Ciputat Timur	Antusias
2	Kemasan dan Merek Kacang	2015	Setu	Antusias

**Penghargaan yang pernah diraih dalam 10 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)**

No	Jenis Penghargaan	Institusi Penghargaan	Pemberi	Tahun
1	Dosen Produktif dalam Penulisan Buku Tahun 2015	Universitas Jakarta	Muhammadiyah	2015

Jakarta, 12 Juni 2017

(Lusi Andriyani, SIP.,M.Si)